

Tata Kelola Kepemimpinan Pemerintah Desa Grogol Terhadap Stagnasi Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkesinambungan

Fitri Rumia¹, Hary Priyanto², Erna Agustina³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

¹rumiafr703@gmail.com, ²harysangabi@gmail.com, ³erna.agustina@untag-banyuwangi.ac.id

Diterima	05	January	2026
Disetujui	15	June	2026
Dipublish	30	June	2026

Abstract

Implementing infrastructure development in rural areas is a strategy for solving economic, social, environmental and poverty problems experienced by village communities. The stagnation of infrastructure development programs causes children to go to school late and look dirty during the rainy season, and other people find it difficult to work even though they have to fulfill various necessities of life. The village head as the highest level of leadership in rural areas needs to increase infrastructure development evenly, increase human resource capacity, and optimize all village potential through collaboration between the government, community and the private sector. The aim of the research is to describe and analyze the function of the Grogol Village Government in improving and distributing infrastructure development programs. This research applies a qualitative descriptive approach. According to research conclusions, the ineffectiveness of the village head's leadership model reduces the motivation of village officials, so that the performance of village government in infrastructure development becomes stagnant. The Grogol Village Head must be able to provide clear directions, be a role model, and establish good communication, thereby creating a work environment that supports the growth and work enthusiasm of officials in meeting the needs of the community.

Keywords: Village Head Leadership; Infrastructure Development; Participatory

Abstrak

Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di pedesaan merupakan strategi dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial, lingkungan, serta kemiskinan yang dialami masyarakat desa. Stagnasi program pembangunan infrastruktur menyebabkan anak sekolah terlambat dan terlihat kumuh jika musim penghujan, serta masyarakat lainnya kesulitan bekerja padahal harus mencukupi berbagai kebutuhan hidup. Kepala desa sebagai pucuk pimpinan tertinggi di wilayah pedesaan perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan semua potensi desa melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Tujuan penelitian untuk mendeskripsi serta menganalisis fungsi Pemerintah Desa Grogol dalam peningkatan dan pemerataan program pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Sesuai kesimpulan penelitian, tidak efektifnya model kepemimpinan kepala desa menurunkan motivasi aparatur desa, sehingga kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur menjadi stagnan. Kepala Desa Grogol harus mampu memberikan arahan yang jelas, menjadi teladan, serta menjalin komunikasi yang baik, sehingga menciptakan



lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan semangat kerja aparatur dalam mencukupi kebutuhan masyarakat

Kata kunci: Kepemimpinan Kepala Desa; Pembangunan Infrastruktur; Partisipatoris.

Pendahuluan

Desa yang dikelola dengan baik akan menjadi pusat pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, pelestarian nilai-nilai budaya, serta penguatan modal sosial masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, serta berhak untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan dan keikutsertaannya dalam sistem pemerintahan NKRI (Ismunandar, et al., 2020).

Pedesaan perlu ditopang oleh aktivitas pembangunan terkait sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan adanya pembangunan desa, masyarakat desa dapat meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, serta tertanganinya masalah kemiskinan. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di pedesaan merupakan strategi menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial, lingkungan, serta kemiskinan. Di Indonesia, desa adalah mitra pembangunan suatu daerah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di pedesaan, pemerintah dapat mengelola aset dan mempermudah penyelenggaraan program pemberdayaan demi tercipta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kabupaten Banyuwangi memiliki 28 administrasi berbentuk kelurahan dan 189 wilayah administrasi berbentuk desa. Salah satu desa yang perlu ditunjang oleh aktivitas pembangunan adalah Desa Grogol, yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Giri. Luas Desa Grogol 9.329 km², yang terbagi dalam 8 wilayah administrasi berbentuk dusun, yaitu: Pelinggihan, Kopendukuh, Laos, Guwo, Putuk,

Lebak, Kedawung, dan Kopenbayah. Jumlah penduduk Desa Grogol adalah 5.675 jiwa, yang terbagi: laki-laki sejumlah 2.750 jiwa, dan perempuan sejumlah 2.925 jiwa (Pemerintah Desa Grogol, 2024).

Wilayah yang luas dan tingginya jumlah penduduk mengharuskan Pemerintah Desa Grogol menyelenggarakan pembangunan secara masif. Selain dapat menguntungkan pemerintah desa dan masyarakatnya, bahwa keberhasilan pembangunan di Desa Grogol berkontribusi langsung pada kemajuan wilayah yang lebih luas, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut sebagai anti-thesis dari realitas jalan desa sebagai bagian dari infrastruktur desa yang tidak tersentuh pembangunan, sehingga rusak parah di berbagai titik dan sulit dilintasi, termasuk jalan menuju kantor desa (observasi dan wawancara peneliti, 2024).

Kepala Desa Grogol sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Desa Grogol perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan semua potensi desa melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang selaras dengan legitimasi kewenangan terhadap otonomi khusus di sebuah desa guna mewujudkan kesejahteraan (Undang-undang nomor 6 Tahun 2014).

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Grogol yang partisipatoris sangat penting, dan berdampak kepuasan masyarakat. Kepala desa selaku pimpinan pemerintahan desa memegang peran strategis mengelola dan membangun



desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinir kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 8 Tahun 2016).

Harapan masyarakat untuk meningkatkan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Grogol sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik. Penyelenggaraan pembangunan di pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah (Sutikno, et al., 2025). Dengan demikian pembangunan infrastruktur di Desa Grogol berperan penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat Desa Grogol dalam meningkatkan kesejahteraan.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi Pemerintah Desa Grogol dalam peningkatan dan pemerataan program pembangunan infrastruktur. Selain hal tersebut, artikel ilmiah ini diharapkan bermanfaat sebagai literatur penting dalam pengembangan ilmu administrasi, khususnya terkait kebijakan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini:

1. Sebagai kontribusi pemikiran untuk menjadi bahan pertimbangan dan/atau masukan bagi Pemerintah Desa Grogol untuk program pembangunan infrastruktur agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Grogol.
2. Sebagai pemikiran baru untuk program pelayanan publik agar Pemerintah Desa Grogol dan masyarakatnya bisa saling kolaborasi demi terselenggaranya

pembangunan infrastruktur desa yang mensejahterakan dan berkualitas baik.

Tinjauan Pustaka

1. Penelitian terdahulu

Hasil analisis sintesis peneliti terhadap artikel ilmiah dari penelitian terdahulu memberi manfaat bagi peneliti untuk mencari gambaran serta memperjelas kerangka berpikir yang selanjutnya bermanfaat dalam pembahasan suatu penelitian.

Menurut Masdianto, et al (2021), motivasi kerja perangkat desa mempengaruhi, kinerja dalam segi pelayanan, serta penyelenggaraan, pemerintahan desa. Perangkat desa merupakan komponen integral dalam struktur pemerintahan desa, yang terdiri dari pegawai desa, termasuk sekretaris desa dan berbagai perangkat desa lainnya, yang beroperasi di bawah kepemimpinan kepala desa. Masalah dan faktor yang mempengaruhi motivasi perangkat desa yaitu motivasi intrinsik, sebagai faktor utama yang memengaruhi perilaku manusia. Dalam konteks lingkungan kerja, motivasi memiliki peranan penting yang berkaitan dengan pekerjaan. Oleh karenanya kepala desa juga perlu menegaskan kedisiplinan aparaturnya terkait dengan kehadiran di tempat kerja dan aktif komunikasi dengan masyarakat agar memahami kebutuhannya.

Pada penelitian Saputra, et al (2023), bahwa tugas kepemimpinan kepala desa model transformasional sangat penting. Karena mengacu pada kemampuan seorang kepala desa untuk membawa perubahan positif melalui visi jelas, komunikasi efektif, serta keterlibatan aktif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemimpin transformasional tidak hanya bertindak sebagai administrator, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menggugah kesadaran kolektif masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, sehingga dapat menangani berbagai tantangan aspek teknis, sosial, dan administratif, seperti: (1) Keterbatasan anggaran desa, sehingga kepala



desa harus mencari alternatif pendanaan melalui program pemerintah, kerja sama dengan pihak swasta, ataupun swadaya masyarakat; (2) dinamika sosial di masyarakat sehingga kepala desa mengelola perbedaan pendapat, membangun komunikasi yang efektif, serta memastikan adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen desa.

Pada penelitian lainnya, Nelly, et al (2024) menegaskan jika kinerja pemerintahan melalui model teori organisasi dapat melihat potensi baik dan buruknya kinerja aparatur desa yang punya tugas dan peran strategis dalam pembangunan desa berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pemerintah desa harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut mencakup dedikasi untuk melayani masyarakat dengan baik, transparansi dalam pengelolaan layanan, serta responsif terhadap masukan dan keluhan dari masyarakat. Dengan komitmen kuat, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih baik di tingkat desa.

2. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan adalah tulang punggung pengembangan organisasi. Tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit mencapai tujuan organisasi. Jika seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka orang tersebut perlu memikirkan gaya kepemimpinannya. Ekawati, et al. (2024); Syafie (2003:133); Nawawi (2001:21); Siagian (2014:30); Setiawan (2012:17) menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil melalui himbauan emosional dan lebih baik dibandingkan dengan melalui kekuasaan kepemimpinan merupakan seni menetapkan bakat sebagai yang penting dan berpengaruh besar terhadap kemampuan mewujudkannya

bakat kepemimpinan seperti bakat lain yang dimiliki setiap orang namun berbeda kualitas dan kuantitasnya, antara yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan pendapat ini berarti kepemimpinan akan berlangsung efektif dan efisien ditangan orang-orang yang kuantitas bakatnya besar dan kualitasnya tinggi. kepemimpinan merupakan cabang dari ilmu administrasi, khususnya administrasi negara.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014; Anjarwati, et al. (2023); Utami, et al. (2023); Wulandari, et al. (2021) menjelaskan jika kepala desa adalah pemimpin tertinggi di desa, formal maupun informal, yang setiap waktu berada di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. Kepala desa tidak hanya menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketenteraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat diperbaiki seperti sudiakala, tetapi juga agar orang yang melanggar hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula. Hal tersebut karena kepala desa sebagai pucuk pimpinan dalam pemerintahan desa punya kewenangan untuk melakukan dan tidak melakukan tindakan (Priyanto, 2023). Jika pemerintah desa memilih melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya, dan kebijakan tersebut tidak semata-mata keinginan pemerintah (Zakiyah & Priyanto, 2024). Menurut Priyanto & Hentika (2024), perlu pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah agar kekurangan dan kesalahan dari implementasi bisa diperbaiki.

Suksesnya pemerintah desa mencapai tujuan ditentukan dari bagaimana kepala desa memimpin pemerintahan desa. Agar aparatur desa mengikuti kepala desa mencapai tujuan organisasi, maka kepala desa harus menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu: (1) Perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi pemerintahan desa dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan pemerintah desa; (2) Adanya perencanaan tidak tertulis yang akan digunakan



dalam jangka pendek, pada keadaan darurat, dan kegiatan yang bersifat terus menerus; serta perencanaan tertulis yang digunakan menentukan kegiatan yang akan dilakukan atas dasar jangka panjang dan menentukan prosedur yang diperlukan; (3) Mampu memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku yang mencerminkan jika kepala desa tidak pernah mengingkari dan menyeleweng; (4) Adanya pengawasan agar hambatan-hambatan dapat segera ditemukan dan dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung sebagaimana rencana; (5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dan solutif sehingga dapat menyelesaikan berbagai harapan masyarakat; dan (6) Mampu memberi motivasi yang mencerminkan perhatian tulus, sehingga tercipta lingkungan positif, dan meningkatkan keterlibatan dan produktivitas berbagai pihak.

3. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan desa, yang didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat desa sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat desa dalam proses implementasinya. Pitaloka, et al. (2024); Safinah, et al. (2024) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga negara yang humanistik. Pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan suatu perubahan berkaitan dengan keberhasilan pembangunan desa. Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial

masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Kepala Desa harus mampu mengarahkan pembangunan infrastruktur desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karenanya implementasinya harus terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Hal tersebut sebagai penjabar bahwa program pembangunan yang dilaksanakan di desa dimaksudkan sebagai upaya mendorong adanya prakarsa agar pembangunan yang baik, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 menjelaskan perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipasi guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Undang-undang nomor 66 tahun 2007 menekankan jika pemerintah desa dalam membuat suatu rencana pembangunan berprinsip pada aspek: pemberdayaan, terbuka, keberlanjutan, dan proses berulang.

Suatu pembangunan akan tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan bermanfaat apabila pembangunan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik, seperti perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Asnudin (2005); Kodoatie (2005) menjelaskan infrastruktur pedesaan sebagai suatu hal yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat pedesaan, seperti menyediakan jalan, bangunan



gedung dan fasilitas publik lainnya. Oleh sebab itu, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan. Prasetyo & Firdaus (2009: 223-236) membagi infrastruktur menjadi 3 hal: infrastruktur ekonomi untuk menunjang aktivitas ekonomi, utilitas publik berupa tenaga, gas, air, telekomunikasi, sanitasi dan berupa irigasi, jalan, drainase, bendungan serta untuk sektor transportasi berupa jalan, pelabuhan dan seterusnya; Infrastruktur sosial berupa perumahan, kesehatan dan pendidikan; dan infrastruktur administrasi berupa koordinasi dan penegakan hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dapat menghasilkan hipotesis dan memberi gambaran tentang fenomena yang diteliti selain mengumpulkan data yang lebih rinci. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi terkait program pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Desa Grogol. Diharapkan dengan pendekatan kualitatif dapat mengungkap situasi dan permasalahan dalam program pembangunan tersebut.

Alasan peneliti mengambil lokasi di Desa Grogol karena keberadaan jalan rusak parah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui jika tidak ada program pembangunan (perbaikan) meskipun pada saat kampanye pemilihan kepala desa, setiap calon kepala desa menjanjikan pembangunan infrastruktur secara merata.

Wawancara bebas terpimpin terhadap informan dilakukan dengan pedoman wawancara yang disiapkan sebelumnya. Informan dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu memiliki kesesuaian pada situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong dalam Sukma, et al., 2023). Meskipun penentuan informan berpijak dari pertimbangan tertentu, Priyanto (2018) memberi batasan kriteria informan, yaitu: berusia antara 17 hingga 65 tahun dan tidak pikun sehingga mampu memberikan informasi berupa data

yang representatif, tidak cacat bicara, berpendidikan paling rendah setingkat SD, bisa diajak komunikasi, mau menjadi informan, jujur, dan tidak dikucilkan oleh masyarakat disekitarnya, mengetahui hal-hal yang sedang diteliti.

Peneliti menggunakan sumber data primer, yaitu data penelitian yang di dapat langsung dari sumber aslinya tanpa perantara; dan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat orang lain dan bermanfaat sebagai penunjang dari data primer (Septiana, et al., 2024). Data dikumpulkan untuk menguji teori dan memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti berpijak pada observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan. Setelah data terkumpul, peneliti mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif. Sesuai jenis penelitiannya, peneliti menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data terkumpul, diolah dan di analisa dengan memberi penafsiran berupa uraian. Adapun sistematika peneliti disesuaikan dengan teori Miles dan Huberman (dalam Shiddiqi, et al., 2024), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan Kesimpulan.

Pertanggung jawaban terhadap keabsahan data untuk membuktikan jika penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus menguji data peneliti yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Terkait hal tersebut, peneliti berpedoman pada prinsip kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Prinsip tersebut penting dilakukan agar membantu mengidentifikasi potensi bias dan meminimalkan risiko kesalahan interpretasi data.

Hasil dan Pembahasan

1. Model Pembangunan partisipatoris

Perlunya pembangunan infrastruktur di Desa Grogol menarik perhatian publik.



Minimnya pembangunan memungkinkan masyarakat Desa Grogol mengalami kesulitan mencapai taraf hidup yang lebih layak, merepotkan pelajar mendapat akses pendidikan cepat, sekaligus menyulitkan untuk berkembang dan bersaing. Meter dan Horn (dalam Hidayat, et al., 2023) menyatakan implementasi pembangunan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah, dan swasta untuk mencapainya tujuan yang ditetapkan. Parsons (dalam Septriana, et al., 2024) menyatakan dalam proses formulasi kebijakan, suatu masalah harus didefinisikan dengan benar dan jelas agar memastikan jika kebijakan yang diusulkan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Rippley dan Franklin (dalam Salsabila, et al., 2024) mengemukakan jika implementor kebijakan harus mampu mengeliminir permasalahan atau pelanggaran yang ditemui. Maknanya Kepala Desa melalui aparaturnya harus bisa menyelesaikan masalah tidak justru menambah beban masalah. Aktivitas yang tidak relevan dengan kebijakan yang ada berpotensi menyebabkan implementasi program tidak memberdayakan namun justru menciptakan kemarginalan dalam masyarakat (Firdaus, et al., 2023).

Sesuai temuan dalam penelitian lapangan, aktivitas masyarakat Desa Grogol sangat bergantung dengan layaknya infrastruktur, khususnya pada jalan-jalan poros yang menghubungkan antar dusun maupun antar desa (hasil wawancara, 2024).

Peneliti berpendapat, Kepala Desa Gorogol perlu memprioritaskan sumber daya yang ada untuk mengelola program pembangunan dengan cepat dan sesuai sebagaimana diharapkan masyarakat. Kepala Desa Grogol harus menjadi pengelola suatu kesatuan lingkungan yang baik dan menjadi fasilitator dalam peningkatan dan pemerataan sarana serta prasarana sebagaimana harapan masyarakat. Kepala Desa Grogol harus mampu memberdayakan masyarakat agar tercipta

pembangunan partisipatoris. Prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 1 pada ayat 17 dalam Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 8 tahun 2016, bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berprinsip pada kebijakan tersebut, Kepala Desa Grogol tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, baik mengelola potensi sumber daya secara efektif dan efisien, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Upaya mencapai keberhasilan dalam implementasi pembangunan harus disertai dengan pola kerja yang sejalan pada tujuan (Azizah, et al., 2025). Desa memiliki potensi strategis, terdepan dalam pembangunan, dan menjadi tonggak utama keberhasilannya, sehingga perlu ada perhatian yang seimbang dalam menyelenggarakan suatu kebijakan. Osborne dan Plastrik (dalam Madhania, et al., 2023) yang menyatakan pemerintah sebagai lembaga yang besar, kompleks, dan ruwet.

Sebagaimana temuan penelitian lapangan, dampak tidak terjamahnya pembangunan infrastruktur menyebabkan anak sekolah kerap terlambat terlebih jika musim hujan, dan masyarakat umum lainnya kesulitan menjalankan pekerjaan lain padahal ada berbagai kebutuhan hidup yang harus dicukupi (hasil wawancara, 2024).

Peneliti berpendapat jika Kepala Desa Grogol harus benar-benar memposisikan



sebagai garda terdepan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur yang merata demi terpenuhinya kemudahan masyarakat dalam beraktivitas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi, serta memenuhi kebutuhan rakyat. Dengan hadirnya pemerintah, semua wilayah, kegiatan, dan batas-batasnya dapat dikontrol serta diawasi dengan mudah. Noviana & Priyanto (2023) mengemukakan, implementasi merupakan transformasi dari rencana ke praktik untuk mencapai tujuan. Priyanto, et al. (2021) menjelaskan partisipasi masyarakat diperlukan dalam program yang dimiliki pemerintah sebagai pihak perancang, penyelenggara, dan pembayar pada aktivitas pembangunan. Partisipasi bisa berdampak kesejahteraan bagi masyarakat (Priyanto & Noviana, 2023). Peran pemerintah desa dalam pembangunan terbagi menjadi regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator (Agustin, et al., 2025).

2. Efektivitas Program Pembangunan Merata

Pemerintah Desa Grogol harus mampu mengatasi masalah pembangunan yang membelenggu masyarakat Desa Grogol. Sebab Kepala Desa Grogol melalui kebijakannya dapat memberi fasilitas publik, serta kesempatan yang kondusif bagi kehidupan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah mereka. Meningkatkan kontribusi dan kualitas kepatuhan aparatur pada suatu implementasi kebijakan harus disertai dengan partisipasi, monitoring, serta evaluasi (Priyanto, 2024).

Peneliti dalam menganalisis kontribusi Pemerintah Desa Grogol dalam peningkatan dan pemerataan infrastruktur melalui pemikiran Colquitt, et al. (2009) yang terdiri dari kepemimpinan, motivasi pegawai, dan kinerja organisasi.

Pertama, kepemimpinan. Colquitt, et al. (2009) berpendapat jika aspek kepemimpinan merupakan unsur yang pertama, karena

mencakup arahan, pengaruh serta usaha untuk menguasai dengan tujuan untuk mencapai hal yang diinginkan dalam wadah organisasi. Sifat kepemimpinan senantiasa hadir dalam setiap bentuk organisasi yang didalamnya memiliki struktur, visi misi, dan tentunya tujuan yang perlu di capai. Kepemimpinan adalah sebagai penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mengarahkan aktivitas followers terhadap pencapaian tujuan. Arah itu dapat mempengaruhi penafsiran pengikut peristiwa, organisasi kegiatan kerja mereka, komitmen mereka untuk tujuan-tujuan penting, hubungan dengan pengikut lainnya, atau akses mereka untuk kerjasama dan dukungan dari unit kerja lainnya (Colquitt dalam Salam, 2013).

Sesuai temuan lapangan, masyarakat beranggapan jika minimnya pembangunan yang merata di Desa Grogol disebabkan oleh kualitas kepemimpinan Kepala Desa Grogol (hasil wawancara, 2025).

Peneliti berbandapat, optimalisasi kepemimpinan Kepala Desa Grogol memerlukan pendekatan yang terintegrasi sehingga terpastikan jika keberadaannya mampu memaksimalkan perannya sebagai pemimpin dalam mengarahkan dan memengaruhi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Desa Grogol, diperlukan diskusi dan serap aspirasi yang terdiri dari struktur lapisan masyarakat guna memiliki nilai kesamaan dan kebutuhan antara pemerintah desa dan lapisan masyarakat. Dalam pemahaman peneliti, pimpinan tertinggi pemerintah desa adalah kepala desa. Oleh karenanya harus mampu menjadi penanggung jawab aspirasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan pembangunan secara merata, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Kepemimpinan akan mempengaruhi sistem kinerja dan sangat menentukan kinerja pemerintah desa, karena esensi pokok dari kepemimpinan untuk mempengaruhi seseorang



agar lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Esensi yang dirasakan oleh seseorang bisa berbeda, hal ini disebabkan dalam kepemimpinan tergantung karakteristik tugas dan siapa yang memimpin. Setiap orang memiliki pola kepemimpinan yang berbeda, sehingga dampak kepemimpinan terhadap masyarakatpun berbeda. Kepemimpinan bagaimana mengajak orang bertindak dengan benar dan dapat memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi seseorang (Latif et al., 2019; Mustanir & Jaya, 2016).

Sesuai analisis peneliti, kurangnya komunikasi efektif antara Pemerintah Desa Grogol dengan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memperburuk masalah pembangunan. Rendahnya komunikasi dapat mengurangi keberhasilan implementasi kebijakan, karena kepatuhan kelompok sasaran akan dipengaruhi oleh isi atau program kebijakan (Dinasty, et al., 2025). Ketidakterbukaan dalam perencanaan pembangunan membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya partisipasi warga dalam mendukung program-program pemerintah desa. Di sisi lain, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan menyebabkan hasil yang tidak maksimal serta berpotensi penyalahgunaan anggaran. Jika pola kepemimpinan seperti hal tersebut terus berlanjut, dan mengesampingkan evaluasi tentu akan mempengaruhi stabilitas sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi di Desa Grogol. Perbaikan model kepemimpinan Kepala Desa Grogol dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang aktif merupakan hal penting yang harus diaplikasikan.

Kedua, motivasi pegawai. Motivasi sebagai suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Colquitt

(dalam Salam, 2009:178) menyatakan motivasi dapat mempengaruhi inisiatif dalam bekerja, menentukan arah, intensitas dan ketekunan, karena motivasi memiliki pengaruh yang besar dalam suatu kepemimpinan. Motivasi pegawai secara umum dapat didekripsikan sebagai dorongan internal atau eksternal yang memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja seorang individu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya di lingkungan organisasi. Oleh karenanya motivasi kerap diartikan sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan seseorang pasti memiliki sesuatu faktor yang mendorong aktivitas tersebut. Aspek pendorong dari seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu pada umumnya adalah kebutuhan serta keinginan orang tersebut.

Sesuai temuan dalam penelitian lapangan, aparatur Desa Grogol cenderung berpihak pada aktivitas pelayanan administrasi dibandingkan pekerjaan dalam meningkatkan pembangunan secara merata (hasil wawancara, 2025).

Peneliti berpendapat, fenomena yang berkaitan dengan motivasi aparatur desa grogol terdapat dalam skema struktural kepemimpinan, yang di pimpin Kepala Desa Grogol dan diisi jajaran di bawahnya. Motivasi aparatur Desa Grogol merujuk pada struktrul Pemerintah Desa Grogol itu sendiri. Sikap Kepala Desa Grogol menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola Pemerintahan Desa Grogol dalam pembangunan infrastruktur, sebab berkaitan dengan cara kepemimpinan Kepala Desa Grogol dalam mengkoordinir, mengevaluasi dan membentuk hasil hasil musyawarah dalam lembaga desa itu sendiri. Motivasi aparatur Desa Grogol dapat muncul jika Kepala Desa Grogol memiliki cara efektif dalam meningkatkan rasa kebersamaan dan meningkatkan solidaritas. Dalam perspektif New Public Service, pemimpin desa yang baik adalah mampu mempersatukan aparatur dan masyarakatnya untuk menjalankan program



pembangunan di segala bidang.

Tanpa adanya motivasi, suatu program yang disusun oleh pemerintah desa tidak akan mencapai tujuan tanpa adanya sebuah tindakan. Sebagaimana pernyataan Priyanto (dalam Efendi, et al., 2025), kebijakan harus diimplementasikan. Implementasi merupakan penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah serta melibatkan berbagai yang pihak berkepentingan. Dalam hal ini, implementasi program harus dilaksanakan secara konsisten agar tujuan yang telah ditetapkan dalam proses implementasi dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan, motivasi kerja aparatur Desa Grogol dalam melayani menyelesaikan masalah masyarakat masih rendah, baik karena pulang sebelum waktunya maupun tidak adanya ide-ide untuk meningkatkan dan pemeratakan pembangunan sebagaimana harapan masyarakat (hasil wawancara, 2025).

Peneliti berpendapat, motivasi aparatur desa memiliki korelasi terhadap prestasi kerja, karena motivasi merupakan faktor utama yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu. Motivasi bertindak sebagai penggerak yang menentukan seberapa besar usaha, intensitas, dan dedikasi yang diberikan aparatur dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Hasil wawancara peneliti dengan aparatur Desa Grogol (2025), kinerja aparatur desa terbagi 2 hal: sesuai tugas pokok dan fungsi, dan tugas-tugas lain yang diperintah oleh Kepala Desa. Realitas tersebut menjelaskan jika keberhasilan motivasi bergantung seberapa baik melayani Kepala Desa. Padahal aparatur yang termotivasi secara positif cenderung memiliki fokus yang lebih baik, menunjukkan komitmen melayani [masyarakat] yang tinggi, dan berupaya memberikan hasil kerja yang optimal. Sebaliknya, kurangnya mengutamakan motivasi pada pimpinan justru dapat

mengurangi semangat kerja, menurunkan produktivitas, dan mempengaruhi kualitas kinerja sebagai aparatur. Prestasi kerja secara formal didefinisikan sebagai nilai dari serangkaian perilaku karyawan yang memberikan kontribusi, baik positif maupun negatif, untuk pencapaian tujuan organisasi (Colquitt, et al., 2009:37). Maknanya, motivasi aparatur Desa Grogol sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Ketiga, kinerja organisasi. Kinerja organisasi dalam Pemerintah Desa Grogol dapat dinilai dari motivasi kerja aparaturnya. Kinerja organisasi adalah nilai dari perilaku karyawan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi (Colquitt, et al., 2009:38). Motivasi yang tinggi akan mendorong aparatur desa untuk bekerja lebih keras, lebih kreatif, dan lebih produktif dalam mencapai tujuan pemerintahan desa. Sebaliknya, kurangnya motivasi dapat menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan. Kepemimpinan kepala desa yang efektif serta keterpaduan antara kepemimpinan yang baik dan motivasi aparatur yang tinggi menjadi aspek penentu keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, aparatur Desa Grogol lebih mengutamakan menjalankan perintah Kepala Desa Grogol dibanding menyelesaikan kebutuhan masyarakatnya (hasil wawancara, 2025).

Peneliti berpendapat, bahwa kinerja Pemerintah Desa Grogol mencerminkan efektivitas dan efisiensi proses kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa Grogol semestinya memiliki sistem kerja yang baik, strategi yang jelas, dan komunikasi yang efektif cenderung menunjukkan kinerja yang lebih optimal, bukan sebaliknya. Evaluasi kinerja Pemerintah Desa Grogol dapat dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Dengan peningkatan kinerja aparatur yang berkelanjutan, Pemerintah Desa



Grogol dapat meningkatkan daya saingnya di tengah dinamika harapan yang terus berubah, bertambah, dan cepat. Kombinasi antara kinerja aparatur desa yang baik dan sinergi antar bagian dalam Pemerintah Desa Grogol sangat penting untuk menciptakan hasil yang maksimal.

Fenomena rendahnya kinerja Pemerintah Desa Grogol berdampak pada peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya jalan, khususnya yang berada di Dusun Kopendukuh. Peran Kepala Desa Grogol sangat mempengaruhi pembangunan desa yang tidak mencapai target dari rencana yang telah ditetapkan. Selain itu status Indeks pembangunan Desa Grogol yang berstatus tertinggal juga tak terlepas dari peran Kepala Desa Grogol. Dalam perspektif administrasi publik, Kepala Desa bertanggung jawab pada penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, termasuk mencukupi segala kebutuhan lain dari masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Kepala Desa Grogol kurang bisa menerima kritik karena cenderung menghidupkan asumsi-asumsi yang sarat politis, seperti bukan pendukungnya atau asumsi yang dianggap menjatuhkannya (hasil wawancara, 2025).

Menurut pendapat peneliti, Kepala Desa Grogol sebagai pemimpin di Desa Grogol harus berfikir objektif, menerima saran atau kritik masyarakat, perlu meningkatkan kinerja kepemimpinan yang efektif, dan mampu memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Desa Grogol secara mereata. Fenomena pembangunan infrastruktur yang tidak merata di Desa Grogol menjadi suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Kepala Desa Grogol. Apabila pola kepemimpinan Kepala Desa kurang efektif, efisien dan tidak sesuai dengan tujuan dalam rancangan pembangunan, maka dampaknya masyarakat merasa tidak puas terhadap pola kepemimpinannya.

Pemerintah desa dan aparturnya ialah administrator penyelenggara pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan (Priyanto, 2023). Selaku pelaksana pemerintahan, Pemerintah Desa Grogol merupakan lembaga pemerintahan di tingkat desa yang bertanggung jawab atas situasi yang terjadi dalam masyarakatnya, terutama berkaitan dengan peningkatan akses untuk kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa Grogol juga perlu bergerak di bidang pemberdayaan agar membentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi dari program Pemerintah Desa Grogol.

Kesimpulan

Tidak efektifnya model kepemimpinan Kepala Desa Grogol menurunkan motivasi aparatur Desa Grogol, sehingga kinerja Pemerintahan Desa Grogol dalam mencukupi kebutuhan masyarakat terkait pembangunan infrastuktur menjadi stagnan. Kepala Desa Grogol harus mampu memberikan arahan yang jelas, menjadi teladan, serta menjalin komunikasi yang baik, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan semangat kerja aparatur dalam mencukupi kebutuhan masyarakat.

Motivasi kepala desa dan aparatur desa yang tinggi dan bersifat intrinsik maupun ekstrinsik, bisa mendorong kinerja pemerintahan yang lebih produktif dan bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing organisasi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, sinergitas antara gaya kepemimpinan yang tepat antara Kepala Desa Grogol dengan motivasi aparatur desa yang optimal, bisa menghasilkan kinerja organisasi yang lebih unggul, dan akan mampu meningkatkan pembangunan infrastuktur secara merata, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka



- Agustin, Eka Nanda., Hary Priyanto, & Safrieta Jatu Permatasari. (2025). Metal Children Of Port Ketapang: The Reality Of Poverty In The Implementation Of Sustainable Development. *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET)*, 4(2), 347–358. Doi: 10.54443/ijset.v4i2.671.
- Anjarwati, Desy Dwi., Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika. (2023) Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. 4 (1). Doi: 10.37680/almikraj.v4i1.3568.
- Asnudin, Andi. (2005). *Manajemen Proyek Kontruksi*. UNTAD Press-Palu.
- Azizah, Fahreza Nur., Sri Wilujeng, & Hary Priyanto. (2025). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Kolaboratif Triple Helix: Suatu Identifikasi Dan Mengatasi Patologi Pelayanan Kependudukan Di Desa Sukomaju. *Nusantara Hasana Journal*, 4(8), 92–103. Doi: 10.59003/nhj.v4i8.1310.
- Colquitt, J.A., LePine, J.A., Wesson, M.J. (2009), *Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace*. McGraw-Hill, New York.
- Dinasty, Puja Aulia., Hary Priyanto, & Niko Pahlevi Hentika. (2025). Perlindungan Perempuan Bawah Umur Dari Perilaku Pedofilia: Suatu Penerapan Model Kolaborasi Pentahelix. *Nusantara Hasana Journal*, 4(10), 40–53. Doi: 10.59003/nhj.v4i10.1385.
- Efendi, I., Priyanto, H., & Pahlevi Hentina, N. (2025). Analisis Kontradiksi Aktivitas Prostitusi Di Eks. Lokalisasi Pakem, Banyuwangi. *Katarsis*, 2(2), 85–95. Doi: 10.62734/kts.v2i2.567.
- Ekawati, E. P., Priyanto, H., & Agustina, E. (2024). Dampak Kualitas Implementasi Aparatur Desa Kepundungan Pada Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 13038–13052. Doi:10.31004/innovative.v4i1.10592.
- Firdaus, R., Priyanto, H., & Agustina, E. (2023). Critical Study On Policy Implementation Of Withdrawal Of Provincial Road Retributions By The Government Of Tamansari Village Based On Government Regulation 97/2012. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 7(2), 306- 312.
- Ismunandar, D., Rosyadi, Nandang, & Aziz, K. (2020). Pendampingan Belajar Matematika Pada Materi Pecahan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. *Abdi Wiralodra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45–56. Doi: 10.31943/abdi.v2i1.242.
- Kodoatie, Robert J. (2005). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Latif, Adam., Irwan Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, and Muh Sutrisno. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Ciamis* 5 (1): 1–15.
- Hidayat, N. A. P., Priyanto, H., & Agustina, E. (2023). Study Of Online Single Submission-Based Integrated Service Implementation In Banyuwangi District. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(5), 1496-1503. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i5.1030.
- Madhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2023). Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di



- Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. Nusantara Hasana Journal, 3(3), 145-155. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.975.
- Masdianto, M., Hannan, M., & Adnan, M. A. (2021, December). Motivasi Kerja Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Taan Kecamatan Tapalang. In Journal Pegguruang: Conference Series (Vol. 3, No. 2, pp. 730-739). Doi: 10.35329/jp.v3i2.2368.
- Mustanir, A., & Jaya, I. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, 04(1), 84-97.
- Nawawi, Hadari. (2001). Manajemen Sumber daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nelly, S., Putri, N., Margaretha, J., Anggelia, S., Belki, B., & Charolina, I. (2024). Kinerja Pemerintahan Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Sociopolitico, 6(2), 179-184. Doi: 10.54683/sociopolitico.v6i2.144.
- Noviana, N., & Priyanto, H. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. Partners Universal International Research Journal, 2 (2). Doi: 10.5281/zenodo.8051223.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 2(2), 222-236.
- Pitaloka, N. R. A., Imaniar, D., & Priyanto, H. (2024). Intensitas Badan Permusyawaratan Desa Wongsorejo Dalam Mewujudkan Good Governance. Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 4(02), 2745-4584, Doi: 10.37680/almikraj.v4i02.4890.
- Priyanto, H. (2018). Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi. Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 7(1). Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03.
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494.
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. Majalah Ilmiah Dian Ilmu, 22(2). Doi: 10.37849/midi.v22i2.330.
- Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. Qalamuna Journal, 15(2), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.
- Priyanto, H. (2024). Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 8(1). Doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657.
- Priyanto H., & Hentika NP. (2024). Collaborative Penta Helix Stakeholders Dalam Pembangunan Inklusi Yang Berkelanjutan; Suatu Diskursus Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi



- Penyandang Disabilitas. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*. 24(1): 67-87. Doi: 10.37849/midi.v24i1.404.
- Salam, S., A. Fatahilah, D. Sunarti dan Isroli. (2013). Berat Karkas Dan Lemak Abdominal Ayam Broiler Yang Diberi Tepung Jintan Hitam (*Nigella Sativa*) Dalam Pakan Selama Musim Panas. *Sains Pet*. 11 (2) : 84 – 89.
- Sutikno, S., Priyanto, H., & Pahlevi Hentika, N. (2025). Pelayanan Publik Dalam Tranformasi “Sakip” Pada Pemerintah Kecamatan Bangorejo. *Katarsis*, 3(1), 28–37. Doi: 10.62734/kts.v3i1.572.
- Safinah, Kuni Putri., Hary Priyanto, & Safrieta Jatu Permatasari. (2024). Aksentuasi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Banyuwangi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 458-465. Doi: 10.36526/santhet.v8i1.3527.
- Salsabila, A. ., Priyanto, H. ., & Vitasari, L. (2024). Kolaborasi implementasi program BPNT dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. *Katarsis*, 1(3), 14-25. Doi: 10.62734/kts.v1i3.280.
- Saputra, A., Aulya, BS., Sabila, FS., & Cahyono, AS. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Besuki. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2320–2327. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.324>.
- Septriana RV, Priyanto H, Vitasari L. (2024). Quality of Representation Women Legislators in the Manifestation of Public Policy Formation in Banyuwangi: Uthopis or Prosperity?. *JOELS: Journal of Election and Leadership*. 5(2): 161-171. Doi:10.31849/joels.v5i2.22406.
- Setiawan, Toni. (2012). *Manajemen Kinerja, Motivasi, Kepuasan Kerja Dan Produktivitas*. Jakarta: Platinum.
- Shiddiqi, Izzul Haque Ash., Leni Vitasari, & Hary Priyanto. (2024). Strategi Komunikasi Calon Legislatif Muda Pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024. *Nusantara Hasana Journal*, 4(3), 64–77. Doi: 10.59003/Nhj.V4i3.1199
- Sukma, Rosa Amelia., Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(6), 1870–1876. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147.
- Siagian, Sondang. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.
- Utami, S. D., Bahri, S., & Priyanto, H. (2023). Implementasi Administratif: Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pembinaan Dan Penyuluhan Pada Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Katarsis*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang nomor 66 tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Wulandari, RS., Krisnayana, R., & Rahmat, D. (2021). Peran Kepala Desa sebagai Administrator dan Supervisor. *Jurnal Sosial Politik Unla*, 26(1), 76-86.
- Zakiah, I. H., & Priyanto, H. (2024). Analisis Inovasi Ekonomi Kreatif Usaha Homestay Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi: Suatu Pemberdayaan Efektif atau Eksistensi Proyek Pemerintah Desa?. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(1), 2715-3339. Doi: 10.37849/mici.v6i1.406.

